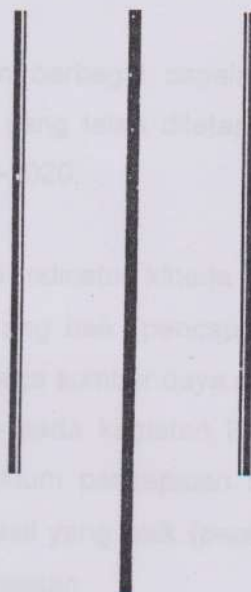




LAPORAN KINERJA (LK) TAHUN 2018



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BINJAI**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam tata pemerintahan yang baik adalah azas Akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai amanah/mandat yang diterima.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja (LK) merupakan Dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Pada intinya Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai ini menyajikan/menggambarkan sejauh mana capaian kinerja utama dan capaian kinerja per-sasaran menurut Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai yang dicapai pada Tahun Anggaran 2018.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai capaian sasaran strategi dalam berbagai indikator sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai periode 2018-2020.

Secara umum, pencapaian tiap indikator kinerja utama pada sasaran strategis yang ditetapkan sudah menunjukkan hasil yang baik (pencapaian >80%) hanya 1 (satu) Indikator kinerja utama dari sasaran strategis Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai pada kegiatan Bimtek pencapaian 0 % dikarenakan perubahan anggaran. Walau secara umum pencapaian tiap indikator pada sasaran strategi yang ditetapkan sudah menunjukkan hasil yang baik (pencapaian >80%) namun masih belum sesuai target yang diharapkan atau ditetapkan.

Terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target yang memuaskan telah dilakukan upaya-upaya perbaikan yaitu :

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya PKL dalam rangka memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan dan ketentuan bagi PKL.
2. Melakukan koordinasi lebih maksimal dan intens pada SKPD terkait khususnya Dispenda dan Ketertiban Pasar, Dinas Sosial dan Depnaker, Dinas Tarukim, dan Dispota dan Pariwisata.
3. Melakukan penambahan jumlah personil Satpol PP.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai disusun sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengolahan sumber daya dan kepercayaan yang diberikan melalui misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2018 ini masih sangat jauh dari sempurna, maka kami sangat mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi perbaikan kinerja kami ke depan. Akhirnya, kami berharap penyusunan Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah ini akan dapat menguji tingkat keberhasilan dan kegagalan yang akan dijadikan sebagai kajian untuk ditindaklanjuti demi perbaikan di masa mendatang.

Binjai, 20 Februari 2018

**KEPALA SATPOL PP
KOTA BINJAI**
**SUGIONO, SE
PEMBINA TK. I
NIP. 19671110 198903 1 007**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam tata pemerintahan yang baik adalah azas Akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai amanah/mandat yang diterima.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja (LK) merupakan Dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Pada intinya Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai ini menyajikan/menggambarkan sejauh mana capaian kinerja utama dan capaian kinerja per-sasaran menurut Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai yang dicapai pada Tahun Anggaran 2018.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai capaian sasaran strategi dalam berbagai indikator sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan di dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai periode 2018-2020.

Secara umum, pencapaian tiap indikator kinerja utama pada sasaran strategis yang ditetapkan sudah menunjukkan hasil yang baik (pencapaian >80%) hanya 1 (satu) Indikator kinerja utama dari sasaran strategis Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai pada kegiatan Bimtek pencapaian 0 % dikarenakan perubahan anggaran. Walau secara umum pencapaian tiap indikator pada sasaran strategi yang ditetapkan sudah menunjukkan hasil yang baik (pencapaian >80%) namun masih belum sesuai target yang diharapkan atau ditetapkan.

Terhadap indikator kinerja yang belum mencapai target yang memuaskan telah dilakukan upaya-upaya perbaikan yaitu :

1. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya PKL dalam rangka memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan dan ketentuan bagi PKL.
2. Melakukan koordinasi lebih maksimal dan intens pada SKPD terkait khususnya Dispenda dan Ketertiban Pasar, Dinas Sosial dan Depnaker, Dinas Tarukim, dan Dispora dan Pariwisata.
3. Melakukan penambahan jumlah personil Satpol PP.

A. Kondisi Umum

1. Latar Belakang

Arus globalisasi menuntut terwujudnya suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk melahirkan suatu pemerintahan yang baik dibutuhkan adanya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi rakyat. Hal ini sesuai dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sebagai tindak lanjut dari UU No. 28 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2007 tanggal 25 Maret 2007 yang memberikan tuntutan kepada instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Laporan Kinerja (LK) merupakan Dokumen akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran.

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengolahan sumber daya dan kepercayaan yang diberikan melalui misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Binjai, Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala Daerah Kota Binjai dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengamanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah Kota Binjai serta peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan Pemerinta Kota Binjai.

Berdasarkan latar belakang tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai membuat Laporan Kinerja (LK) Tahun 2018 sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja (LK) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai Tahun 2018 mencakup hal-hal sebagai berikut :

2.1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan Laporan Kinerja (LK) 2018 sebagai sarana pertanggung jawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi Capaian Kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2018.

2.2. Aspek Manajemen Kinerja

Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LK) 2018 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai bagi upaya – upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

3. Kondisi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai

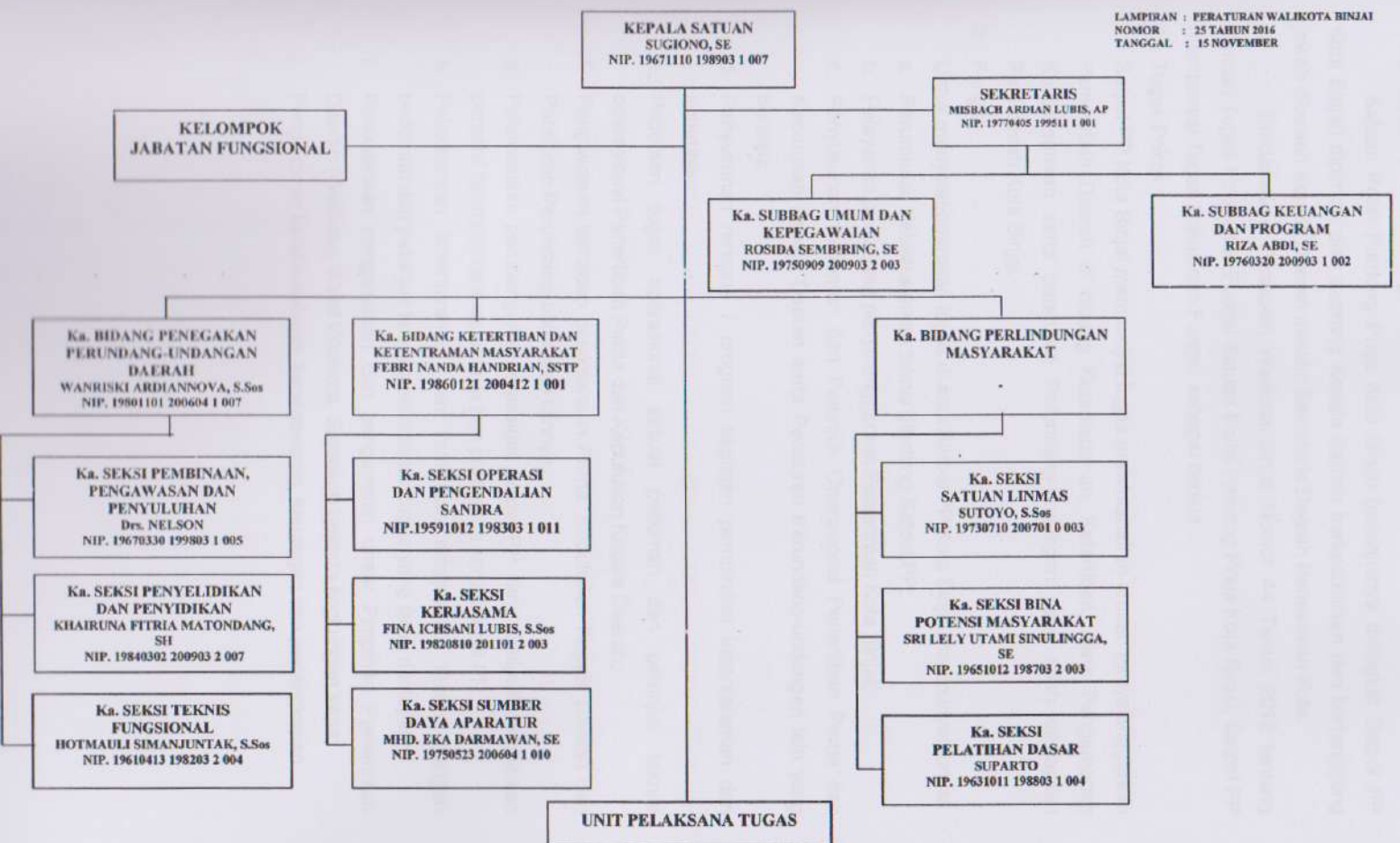
3.1. Susunan Organisasi

Satpol PP Kota Binjai mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris;
- c. Kasubbag Keuangan dan Program
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Unit Pelaksana Tugas;

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI
(PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 19 TAHUN 2007)

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BINJAI
 NOMOR : 25 TAHUN 2016
 TANGGAL : 15 NOVEMBER



3.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Binjai) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan berkedudukan dan bertanggung jawab dibawah Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Pemerintah Kota.

Berdasarkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai, Satpol PP mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Satpol PP Kota Binjai mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Ketenteraman, Ketertiban, serta Pengamanan Kebijaksanaan serta peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Binjai.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas di atas Satpol PP Kota Binjai mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijaksanaan teknis dibidang Satpol PP;
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Kota Binjai;
- c. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Operasional Penertiban Perda dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku;
- d. Penyusunan rencana / program kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- e. Pedoman tugas operasional sesuai pedoman dan petunjuk teknis/ operasional Penertiban Perda dan Keputusan Kepala Daerah;
- f. Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- g. Pelaksanaan pembangunan kapasitas Satpol PP yang meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja Satpol PP;
- h. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan;
- i. Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan unsur Pimpinan Pemerintah Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Setdakot) beserta lingkungan kerja;
- j. Pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

3.3. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Satuan polisi Pamong Praja Kota Binjai pada tahun 2018 memiliki personil sebanyak 167 orang terdiri atas 75 PNS dan 92 Tenaga Satgas Lapangan dengan rincian sebagai berikut:

No.	BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN			
1	Pembina Utama	IV/e	-	Orang
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	Orang
3	Pembina Utama Muda	IV/c	-	Orang
4	Pembina Tk.I	IV/b	1	Orang
5	Pembina	IV/a	1	Orang
6	Penata Tk.I	III/d	8	Orang
7	Penata	III/c	3	Orang
8	Penata Muda Tk.I	III/b	3	Orang
9	Penata Muda	III/a	9	Orang
10	Pengatur Tk.I	II/d	2	Orang
11	Pengatur	II/c	19	Orang
12	Pengatur Muda Tk.I	II/b	6	Orang
13	Pengatur Muda	II/a	15	Orang
14	Juru Tk.I	I/d	1	Orang
15	Juru	I/c	6	Orang
16	Juru Muda Tk.I	I/b	1	Orang
17	Juru Muda	I/a	-	Orang
JUMLAH			75	Orang

No.	BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
1	LAKI – LAKI	67	Orang
2	PEREMPUAN	8	Orang
JUMLAH		75	Orang

No.	BERDASARKAN PENDIDIKAN		
1	S-2	1	Orang
2	S-1	21	Orang
3	D-3	1	Orang
4	SLTA	27	Orang
5	SLTP	9	Orang
6	PAKET C	9	Orang
7	PAKET B	4	Orang
8	SD	3	Orang

4. Sistematika Penulisan Laporan Kinerja 2018

Pertanggungjawaban, akuntabilitas dan ketertarikan Masyarakat Kota Binjai yang sadar dan patuh pada peraturan Daerah dan Peraturan – undangan serta Keputusan Kepala Daerah.

Visi tersebut mengandung arti dan makna yaitu:

a. Meningkatkan nilai kearifan dan ketahanan masyarakat.

b. Meningkatkan pembinaan dalam meningkatkan keadilan dan pemerataan masyarakat terhadap semua – orang yang berkaitan dengan ketahanan dan ketahanan.

2. Pernyataan Misi

a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, Berkompetensi dengan profesionalisme dan meningkatkan sumber daya aparatur yang berintegritas dan berkompetensi, berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan pada Satpol PP Kota Binjai akan menjadi aparat yang berkeadilan dan bertanggung jawab dengan fungsi dan tugasnya masing – masing.

b. Meningkatkan pelayanan masyarakat.

Satpol PP Kota Binjai merupakan salah satu organisasi yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan masyarakat dan memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik dan berkeadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur. Pelayanan masyarakat akan meningkat dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang berkeadilan dan bertanggung jawab.

Satpol PP Kota Binjai akan meningkatkan pelayanan masyarakat yang berkeadilan dan bertanggung jawab.

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perencanaan kinerja Satpol PP Kota Binjai dalam penyelenggaraan pengelolaan berbagai sumber daya publik dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Kota Binjai, maka disusunlah sebuah perencanaan strategis yang diharapkan nanti dapat mewujudkan sinergi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang mendukung Visi dan Misi Kota Binjai.

Sejalan dengan itu Satpol PP Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan demikian diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabilitas disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan Visi

"Terwujudnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Binjai yang sadar dan patuh pada peraturan Daerah dan Perundang – undangan serta Keputusan Kepala Daerah".

Visi tersebut mengandung arti dan makna yaitu :

- a. Meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan–aturan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan.

2. Pernyataan Misi

- a. **Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang beriman dan bertaqwa**, Bahwa dengan memberdayakan dan meningkatkan sumber daya aparatur yang beriman dan bertaqwa, Handal, Profesional, Partisipatif dan Akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai akan terwujud aparatur yang berkualitas dan berkembang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

- b. **Mewujudkan penegakan supremasi hukum.**

Bahwa Satpol PP Kota Binjai merupakan bentuk suatu organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

- c. **Meningkatkan Kompleksitas Sarana dan Prasarana Pendukung dalam melaksanakan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum**

Bahwa efektivitas dan efisiensi melaksanakan pengawasan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perencanaan kinerja Satpol PP Kota Binjai dalam penyelenggaraan pengelolaan berbagai sumber daya publik dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di Kota Binjai, maka disusunlah sebuah perencanaan strategis yang diharapkan nanti dapat mewujudkan sinergi di lingkungan Pemerintah Kota Binjai yang mendukung Visi dan Misi Kota Binjai.

Sejalan dengan itu Satpol PP Kota Binjai diharapkan mampu menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan demikian diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabilitas disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

A. Rencana Strategis

1. Pernyataan Visi

"Terwujudnya Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Binjai yang sadar dan patuh pada peraturan Daerah dan Perundang – undangan serta Keputusan Kepala Daerah".

Visi tersebut mengandung arti dan makna yaitu :

- a. Meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Melakukan pembinaan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan.

2. Pernyataan Misi

- a. **Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang beriman dan bertaqwa**, Bahwa dengan memberdayakan dan meningkatkan sumber daya aparatur yang beriman dan bertaqwa, Handal, Profesional, Partisipatif dan Akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai akan terwujud aparatur yang berkualitas dan berkembang sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

- b. **Mewujudkan penegakan supremasi hukum.**

Bahwa Satpol PP Kota Binjai merupakan bentuk suatu organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

- c. **Meningkatkan Kompleksitas Sarana dan Prasarana Pendukung dalam melaksanakan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum**

Bahwa efektivitas dan efisiensi melaksanakan pengawasan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor yang memadai.

3. Tujuan Strategis

Strategis sebagai berikut :

3.1. Misi pertama : "Meningkatkan Sumber Daya Aparatur yang Handal, Profesional dan Akuntabel", dengan **tujuan**, yaitu :

a. Terwujudnya Pemberdayaan Aparatur yang optimal di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

b. Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

3.2. Misi kedua : "Mewujudkan penegakan supremasi hukum", dengan **tujuan** : Terwujudnya ketentraman dan ketertiban di Kota Binjai.

3.3. Misi ketiga : "Meningkatkan Kompleksitas Sarana dan Prasarana Pendukung dalam melaksanakan pengawasan sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum", dengan **tujuan** : Terwujudnya metode kerja aparatur yang efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pengawasan dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum ditingkatkan melalui penggunaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan kantor yang memadai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Adapun sasaran dari visi dan misi tersebut sebagai berikut :

1. Diberdayakan seluruh aparatur yang ada di Satpol PP Kota Binjai.
2. Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
3. Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
4. Penyelenggaraan pelayanan (ketentraman, dan ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan visi dan misi Satpol PP Kota Binjai tersebut maka Satpol PP Kota Binjai akan mewujudkan **target kinerja utama** pada tahun 2018 yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan sasaran strategis dan indikator kinerja :

1. Penyelenggaraan pelayanan (ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dengan Indikator Kinerja:
 - a. Operasi razia penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima) sebanyak 96 kasus.
 - b. Operasi razia penertiban Pekat (Penyakit Masyarakat) sebanyak 85 kasus.
 - c. Operasi razia penertiban IMB (Izin Mendirikan Bangunan) sebanyak 320 kasus.
 - d. Pengamanan/pengawalan pejabat daerah, hari besar sebanyak 96 kegiatan.
 - e. Pengendalian demonstrasi massa sebanyak 16 kegiatan.
 - f. Bantuan tenaga pendamping TNI / Polri 4 personil.
 - g. Operasi penertiban papan reklame/baliho sebanyak 4 kegiatan.

2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rp. 7.500.000		
3.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Rp. 1.920.724.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.110.514.500
4.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 95.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 124.650.000
5.	Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 30.000.000		
6.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah.	Rp. 48.000.000	Peningkatan Disiplin Aparatur	188.230.000
JUMLAH		Rp. 2.218.411.500	JUMLAH	Rp. 1.423.394.500

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 PAPBD
SATPOL PP KOTA BINJAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan pelayanan (ketenteraman, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	Terlaksananya Operasi Razia Penertiban dan Penegakan Perda/Perwa :	
		1. Operasi penertiban PKL.	90 kasus
		2. Operasi penertiban Pekat.	85 kasus
		3. Operasi penertiban IMB.	320 kasus
		4. Pengamanan/ pengawalan pejabat daerah, & hari besar.	96 kegiatan
		5. Pengendalian demonstrasi massa.	16 kegiatan
		6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	4 orang
		7. Penertiban papan reklame/baliho.	4 kegiatan
		8. Monitoring Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	8 instansi
2.	Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai.	Pemahaman aparatur terhadap Tupoksi SKPD :	
		1. Kegiatan Bimtek.	12 kegiatan
		2. Pelatihan pengendalian keamanan	2 kegiatan

	3. Penyusunan Renstra.	1 laporan
	4. Pelatihan Bagi LINMAS Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	2 kegiatan

No.	Program	Anggaran	Keterangan	
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 117.187.500	Program Sasaran Strategis Tidak Utama	
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rp. 7.500.000		
3.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Rp. 1.920.724.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.110.514.500
4.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 95.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 124.650.000
5.	Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 30.000.000		
6.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah.	Rp. 48.000.000	Peningkatan Disiplin Aparatur	188.230.000
	JUMLAH	Rp. 2.218.411.500	JUMLAH	Rp. 1.423.394.500

Jumlah Anggaran Tahun 2018 PAPBD Rp. 3.641.506.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Capaian Kinerja

1. Target dan Realisasi Capaian Tahun 2018

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Diberdikannya seluruh aparatut yang ada di Satpol PP Kota Binjai. (Sasaran Strategis Tidak Utama)	1. Jumlah layanan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan keuangan dan perbendaharaan yang dihasilkan	760 surat laporan	750 surat laporan	99 %
	2. Jumlah pengaduan dan layanan masyarakat terselesaikan.	32 pengaduan	31 pengaduan	97 %
	3. Jumlah patroli penerbitan rutin yang terlaksana.	38 SPT Operasional	38 SPT Operasional	100 %

		4. Jumlah pengamanan dan pengawalan terlaksana.	360 SPT Pamwal	360 SPT Pamwal	100 %
2.	Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai. (Sasaran Strategis Tidak Utama)	1. Sarana dan Prasarana bidang administrasi ketatausahaan	100 %	100 Persen	100 %
		2. Sarana dan Prasarana bidang kesamaptaan	100 %	100 Persen	100 %
		3. Sarana dan Prasarana bidang operasional dan ketertiban	100 %	100 Persen	100 %
		4. Sarana dan Prasarana bidang pengamanan dan pengawalan	100 %	100 Persen	100 %
3.	Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai. (Sasaran Strategis Utama)	1. Kegiatan Bimtek.	12 kgtan	6 kgtan	50 %
		2. Sosialisasi peraturan Perundang-Undangan	1 Kegiatan	-	%
		3. Pelatihan pengendalian keamanan.	2 kgtan	1 kgtan	50 %
		4. Penyusunan Renstra.	1 laporan	1 laporan	100 %
		5. Pelatihan Bagi LINMAS Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	2 kegiatan	1 kegiatan	50 %
4.	Penyelenggaraan pelayanan (ketenteraman, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. (Sasaran Strategis Utama)	1. Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima).	90 kasus	80 kasus	85 %
		2. Operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat).	85 kasus	82 kasus	97 %
		3. Operasi penertiban IMB (izin mendirikan bangunan).	320 kasus	315 kasus	86 %
		4. Kegiatan pengamanan / pengawalan pejabat daerah, hari-hari besar dan acara-acara tertentu.	96 kgtan	96 kgtan	100%
		5. Pengendalian demonstrasi massa.	16 kgtan	16 kgtan	100 %
		6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	4 orang	4 orang	100 %
		7. Operasi penertiban papan reklame/baliho.	4 kgtan	4 kgtan	100 %
		8. Monitoring Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	8 instansi	8 instansi	100 %

B. Analisis Capaian Kinerja

1. Target dan Realisasi Capaian Sasaran dan indicator Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Diberdayakan seluruh aparaturnya yang ada di Satpol PP Kota Binjai. (Sasaran Strategis Tidak Utama)	1. Bagian tata usaha : urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan keuangan dan perbendaharaan. 2. Bagian P.K kesamaptan : urusan pengaduan dan layanan masyarakat. 3. Bagian operasional dan ketertiban: urusan tugas operasional patroli rutin. 4. Bagian pengamanan dan pengawalan: urusan pengamanan dan pengawalan.	750 srt/lap 30 srt/lap 36 SPT 360 SPT	729 srt/lap 27 srt/lap 36 SPT 360 SPT	97 % 90 % 100 % 100 %	760 surat laporan 32 surat pengaduan 38 SPT Operasional 360 SPT Pamwal	750 surat laporan 31 Surat pengaduan 38 SPT Operasional 360 SPT Pamwal	99 % 97 % 100 % 100 %
2	Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai. (Sasaran Strategis Tidak Utama)	1. Sarana dan prasarana bidang administrasi ketatausahaan 2. Sarana dan prasarana bidang kesamaptan 3. Sarana dan prasarana bidang operasional dan ketertiban 4. Sarana dan prasarana bidang pengamanan dan pengawalan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 % 100 % 100 % 100 %
3	Kinerja aparaturnya dan sumber daya aparaturnya yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.	1. Kegiatan Bimtek. 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Pelatihan pengendalian keamanan.	12 kgtan - 1 kgtan	0 kgtan - 1 kgtan	0 % - 100 %	12 kgtan 1 Kgtan 2 kgtan	6 kgtan - 1 kgtan	50 % % 50 %

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Realisasi 2016	Capaian 2016	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Diberdayakan seluruh aparat yang ada di Satpol PP Kota Binjai. (Sasaran Strategis Tidak Utama)	1. Bagian tata usaha : urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan keuangan dan perbendaharaan. 2. Bagian P.K kesamaptaa : urusan pengaduan dan layanan masyarakat. 3. Bagian operasional dan ketertiban: urusan tugas operasional patroli rutin. 4. Bagian pengamanan dan pengawalan: urusan pengamanan dan pengawalan.	750 srt/lap 30 srt/lap 36 SPT 360 SPT	729 srt/lap 27 srt/lap 36 SPT 360 SPT	97 % 90 % 100 % 100 %	760 surat laporan 32 surat pengaduan 38 SPT Operasional 360 SPT Pamwa I	750 surat laporan 31 Surat pengaduan 38 SPT Operasional 360 SPT Pamwa I	99 % 97 % 100 % 100 %
2	Efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendukung pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai. (Sasaran Strategis Tidak Utama)	1. Sarana dan prasarana bidang administrasi ketatausahaan 2. Sarana dan prasarana bidang kesamaptaa 3. Sarana dan prasarana bidang operasional dan ketertiban 4. Sarana dan prasarana bidang pengamanan dan pengawalan	100 % 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 % 100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 % 100 %	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	100 % 100 % 100 % 100 %
3	Kinerja aparat dan sumber daya aparat yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota	1. Kegiatan Bimtek. 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Pelatihan pengendalian keamanan. 4. Penyusunan	12 kgtan - 1 kgtan 1	0 kgtan - 1 kgtan 1	0 % - 100 % 100 %	12 kgtan 1 Kgtan 2 kgtan 1	6 kgtan - 1 kgtan 1 laporan	50 % % 50 % 100 %

4	Binjai. (Sasaran Strategis Utama)	Renstra	lporan	lporan		laporan	1	
		5. Pelatihan Bagi LINMAS Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	-	-	-	2 kgtan	kegiatan	50 %
4	Penyelenggara raan pelayanan (ketentraman ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang- undangan dan ketentuan yang berlaku. (Sasaran Strategis Utama)	1. Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima).	96 kasus	77 kasus	80 %	90 kasus	80 kasus	85 %
		2. Operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat).	96 kasus	79 kasus	82 %	85 kasus	82 kasus	97 %
		3. Operasi penertiban IMB (izin mendirikan bangunan).	360 kasus	309 kasus	86 %	320 kasus	315 kasus	90 %
		4. Kegiatan pengamanan/pen gawalan hari-hari besar dan acara- acara tertentu.	96 kgtan	95 kgtan	99 %	96 kgtan	96 kgtan	100 %
		5. Pengamanan demonstrasi massa.	16 kgtan	16 kgtan	100 %	16 kgtan	16 kgtan	100 %
		6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	4 orang	4 orang	100 %	4 orang	4 orang	100 %
		7. Operasi penertiban papan reklame/baliho.	2 kgtan	2 orang	100 %	4 kgtan	4 kgtan	100 %

Kendala / Hambatan Pencapaian Target Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kendala/Hambatan
1.	Penyelenggaraan pelayanan (ketentraman, ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku	1. Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima). 2. Operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat). 3. Operasi penertiban IMB (izin mendirikan bangunan). 4. Kegiatan pengamanan/pengawasan hari-hari besar dan acara-acara tertentu. 5. Pengendalian demonstrasi massa. 6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri. 7. Operasi penertiban papan reklame/baliho.	90 kasus 85 kasus 320 kasus 96 kegiatan 16 kegiatan 4 orang 4 kegiatan	80 kasus 82 kasus 315 kasus 96 kegiatan 16 kegiatan 4 orang 4 kegiatan	- Masih kurangnya kesadaran pedagang walau sudah diberi surat peringatan. - Pedagang menggunakan beking aparatur. - Belum maksimalnya koordinasi antara SKPD terkait (Dispenda dan Ketertiban Pasar, Dinas Sosial dan Depnaker, Dinas Tarukim, dan Dispora dan Pariwisata.). - Masih kurangnya jumlah personil Satpol PP dalam melaksanakan operasi penertiban. - Masih minimnya jumlah personil Satpol PP yg berstatus PPNS

2.	Kinerja aparatur dan sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai	1. Kegiatan Bimtek. 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan 3. Pelatihan Pengendalian Keamanan. 4. Penyusunan Renstra. 5. Pelatihan Bagi LINMAS Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	12 kegiatan 1 kgatan 2 kegiatan 1 laporan 2 kegiatan	6 kegiatan - 1 kegiatan 1 laporan 1 kegiatan	- Kurangnya perencanaan yang matang sehingga anggaran kegiatan Bimtek diubah.
----	--	--	--	--	---

3. Target dan Realisasi Sasaran Strategis / Indikator Kinerja pada Renstra Tahun 2012 s/d Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2012	Realisasi 2012	Target 2013	Realisasi 2013	Target 2014	Realisasi 2014	Target 2015	Realisasi 2015	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2018	Realisasi 2018
1	Penyelenggaraan pelayanan (ketentrangan, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	1. Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima). 2. Jumlah operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat). 3. Operasi penertiban IMB (izin mendirikan bangunan). 4. Kegiatan pengamanan / pengawalan hari-hari besar dan acara-acara tertentu. 5. Pengendalian demonstrasi massa.	75 kasus 85 kasus 596 kasus 36 kgtan -	63 kasus 67 kasus 556 kasus 36 kgtan -	72 kasus 72 kasus 576 kasus 96 kgtan -	57 kasus 67 kasus 497 kasus 94 kgtan -	72 kasus 72 kasus 576 kasus 96 kgtan -	62 kasus 67 kasus 530 kasus 94 kgtan -	96 kasus 96 kasus 360 kasus 96 kgtan 16 kgtan	91 kasus 82 kasus 357 kasus 93 kgtan 16 kgtan	96 kasus 96 kasus 360 kasus 96 kgtan 16 kgtan	77 kasus 79 kasus 309 kasus 95 kgtan 16 kgtan	90 kasus 85 kasus 320 kasus 96 kgtan 16 kgtan	80 kasus 82 kasus 315 kasus 96 kgtan 16 kgtan

6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 orang	4 orang	4 orang	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 kgtan	4 kgtan	4 kgtan	
7. Operasi penerbitan papan reklame/baliho.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kgtan	2 kgtan	2 kgtan	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kgtan	2 kgtan	2 kgtan	
1. Kegiatan Bimtek. 2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Pelatihan pengendalian keamanan 3. Penyusunan Renstra. 6. Pelatihan Bagi LINMAS Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	10 kgtan	7 kgtan	12 kgtan	9 kgtan	12 kgtan	-	12 kgtan	9 kgtan	12 kgtan	7 kgtan	12 kgtan	0 kgtan	12 kgtan	6 kgtan
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 kgtan
	-	-	2 kgtan	1 kgtan	-	-	-	-	1 kgtan	-	1 kgtan	1 kgtan	2 kgtan	1 kgtan
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 Laporan
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 kgtan	1 kgtan
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Keadaan Tahun 2018, Program, Anggaran, Realisasi dan Capaian

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.110.514.500	971.327.448	
1. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	76.000.000	20.610.694	36,16
2. Kegiatan : Jasa surat menyurat	0	0	0
3. Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	393.829.500	341.737.350	86,13
4. Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan	75.960.000	75.960.000	100
5. Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor	52.800.000	52.800.000	100
6. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor	48.000.000	48.000.000	100
7. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	58.875.000	58.875.000	100
8. Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	42.000.000	42.000.000	100
9. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	0	0
10. Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	26.250.000	26.250.000	100
11. Kegiatan : Penyediaan makanan dan minuman	196.800.000	186.650.000	94,84
12. Kegiatan : Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	120.000.000	118.464.404	98,72
13. Kegiatan : Belanja sertifikasi/izin frekuensi, repiter dan HT	10.000.000	0	0
14. Kegiatan : Penyediaan Jasa pengelola administrasi keuangan	0	0	0
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	140.725.000	62.772.714	
1. Kegiatan : Pengadaan kendaraan dinas/operasional	51.075.000	44.772.714	87,86
2. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	18.000.000	18.000.000	100
3. Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	0	0	0
4. Kegiatan : Pengadaan pemilihan rutin/berkala gedung kantor	31.500.000	0	0
5. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	20.000.000	0	0
6. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	20.150.000	0	0
7. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Komunikasi	0	0	0
8. Kegiatan : Pengadaan gedung kantor	0	0	0

9. Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala jaringan dan komunikasi	0	0	0
10. Kegiatan : Belanja sertifikasi/ijin frekuensi repiter dan HT	0	0	0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	188.230.000	184.270.000	
1. Kegiatan : Pengadaan mesin/kartu absensi	0	0	0
2. Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	188.230.000	184.270.000	97,90
3. Kegiatan : pengadaan pakaian KORPRI	0	0	0
4. Kegiatan : Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	0	0	0
5. Kegiatan : Pengadaan pakaian olah raga	0	0	0
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	117.187.500	116.220.000	98,46
1. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal	117.187.500	116.220.000	99,17
2. Kegiatan : Sosialisasi peraturan peundang-undangan	0	0	0
3. Kegiatan : Pelatihan Peningkatan kemampuan personal Satpol PP untuk pengendalian massa	0	0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.500.000	7.500.000	100
1. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	7.500.000	7.500.000	100
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	1.980.724.000	1.930.614.000	
1. Kegiatan : pengendalian demonstrasi massa	65.024.000	57.334.000	88,19
2. Kegiatan : Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	33.000.000	32.000.000	96,97
3. Kegiatan : Keamanan dan kenyamanan di lingkungan Rumah Dinas dan Kantor	720.000.000	720.000.000	100
4. Kegiatan : Pelatihan bagi LINMAS penjagaan rumah dinas dan kantor	83.100.000	78.900.000	94,95
5. Kegiatan : Monitoring penjagaan rumah dinas / kantor	0	0	0
6. Kegiatan : Penyiapan tenaga pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	636.000.000	636.000.000	100
7. Kegiatan : Operasional Kegiatan LINMAS	39.500.000	11.600.000	29,37
8. Kegiatan : Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat	346.500.000	337.170.000	97,31
9. Kegiatan : Pengendalian keamanan lingkungan	57.600.000	57.600.000	100

tindak kriminal			
1. Kegiatan : Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	35.000.000	35.000.000	100
2. Kegiatan : Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	60.000.000	0	0
Program Pendidikan Politik Masyarakat	30.000.000	30.000.000	100
1. Kegiatan : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000	30.000.000	100
2. Kegiatan : Pengamanan baliho minggu tenang Pilkada Kota Binjai	0	0	0
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	48.000.000	42.150.000	
1. Kegiatan : Operasi penertiban pajak daerah	48.000.000	42.150.000	
JUMLAH	3.717.881.000	3.379.854.162	90,91

Daftar di atas menunjukkan jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Binjai pada tahun 2019 adalah sebanyak 8 program dan 45 kegiatan dengan anggaran PAPBD sebesar **Rp. 3.717.881.000** dan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 3.379.854.162** mencapai **90,91 %**.

Kendala / Hambatan Pencapaian Target Tahun 2018 pada Satpol PP Kota Binjai yakni :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pedagang kaki lima di Kota Binjai walau sudah diberi surat peringatan.
2. Pedagang kaki lima menggunakan dukungan aparaturnya bila dilakukan penindakan terhadap aksinya berjualan di tempat yang di larang berjualan.
3. Masih belum maksimalnya koordinasi SKPD terkait dengan satpol PP Kota Binjai.
4. Masih kurangnya jumlah personil Satpol PP Kota Binjai dalam melakukan tindak penertiban.
5. Masih sedikitnya jumlah aparaturnya Satpol PP Kota Binjai yang berstatus PPNS.

Dari akuntabilitas keuangan Satpol PP Kota Binjai jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Binjai pada tahun 2018 adalah sebanyak 8 program dan 45 kegiatan dengan anggaran APBD sebesar sebesar **Rp. 3.717.881.000** dan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 3.379.854.162** mencapai **90,91 %**.

B. Saran – Saran

Selain sebagai media pertanggung jawaban, melalui Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah diharapkan mampu menjadi bahan untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Satpol PP Kota Binjai.
2. Meningkatkan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi.
3. Sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
4. Mendorong instansi pemerintah untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Kendala / Hambatan Pencapaian Target Tahun 2018 pada Satpol PP Kota Binjai yakni :

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pedagang kaki lima di Kota Binjai walau sudah diberi surat peringatan.
2. Pedagang kaki lima menggunakan dukungan aparaturnya bila dilakukan penindakan terhadap aksinya berjualan di tempat yang dilarang berjualan.
3. Masih belum maksimalnya koordinasi SKPD terkait dengan satpol PP Kota Binjai.
4. Masih kurangnya jumlah personil Satpol PP Kota Binjai dalam melakukan tindak penertiban.
5. Masih sedikitnya jumlah aparaturnya Satpol PP Kota Binjai yang berstatus PPNS.

Dari akuntabilitas keuangan Satpol PP Kota Binjai jumlah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kota Binjai pada tahun 2018 adalah sebanyak 8 program dan 45 kegiatan dengan anggaran APBD sebesar sebesar **Rp. 3.717.881.000** dan Realisasi Anggaran sebesar **Rp. 3.379.854.162** mencapai **90,91 %**.

B. Saran – Saran

Selain sebagai media pertanggung jawaban, melalui Laporan Kinerja (LK) Instansi Pemerintah diharapkan mampu menjadi bahan untuk :

1. Meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Satpol PP Kota Binjai.
2. Meningkatkan perencanaan disegala bidang, baik perencanaan program/kegiatan maupun perencanaan penggunaan sumber daya organisasi.
3. Sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.
4. Mendorong instansi pemerintah untuk bekerja sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI

1. Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
2. Tugas dan Kewajiban : Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan, penataan, pemeliharaan, pelayanan per dan arsip, pembinaan dan pengawasan termasuk penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah sesuai dengan yang berlaku, serta pengaman kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Binjai.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
 - b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Walikota;
 - d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dengan Kepolisian, PPNS dan atau aparaturnya;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Perda dan Keputusan Walikota;
 - f. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) & Laporan Kinerja;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan pelayanan (ketenteraman, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	1. Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima).	Laporan hasil Bidang Trantibum Satpol PP
		2. Operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat).	Laporan hasil Bidang Trantibum Satpol pp, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata
		3. Operasi penertiban IMB (Izin Mendirikan Bangunan).	Laporan hasil Bidang Trantibum Satpol PP dan Dinas Tarukim
		4. Kegiatan pengamanan / pengawalan hari - hari besar dan acara - acara tertentu.	Laporan hasil Seksi Pamwal Satpol PP
		5. Pengendalian demonstrasi massa.	Laporan hasil Seksi Ops dan Penertiban Satpol PP dan Polri
		6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	Laporan hasil Bidang Trantibum Satpol PP
		7. Operasi penertihan papan reklame/bclliho.	Laporan hasil Bidang Trantibum satpol PP dan Dispenda
		8. Monitoring Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	Laporan hasil Bidang LINMAS
2.	Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai.	1. Kegiatan Bimtek.	Laporan hasil Subbag Umum dan Kepegawaian
		1. Sosialisasi peraturan perundang - undangan	-
		3. Pelatihan pengendalian keamanan.	Laporan hasil Bidang Trantibum & Polri
		4. Penyusunan Renstra.	Laporan hasil Subbag Program dan Keuangan
		5. Pelatihan Bagi LINMAS Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	Laporan hasil Bidang LINMAS

Binjai,
KEPALA SATPOL PP - PP
KOTA BINJAI

2019



SUGIONO, SE
PEMBINA
NIP. 19671110 198903 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BINJAI

1. Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai
2. Tugas dan Kewajiban : Membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan, penataan, pemeliharaan, pelayanan perizinan, dan arsip, pembinaan dan pengawasan termasuk penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Daerah sesuai dengan yang berlaku, serta pengaman kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Binjai.
3. Fungsi :
 - a. Menyusun program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
 - b. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah;
 - c. Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Walikota;
 - d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dengan Kepolisian, PPNS dan atau aparaturnya;
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi Perda dan Keputusan Walikota;
 - f. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA-SKPD) & Laporan Kinerja;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan pelayanan (ketenteraman, ketertiban dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	1. Operasi penertiban PKL (pedagang kaki lima).	Laporan hasil Bidang Trantibum Satpol PP
		2. Operasi penertiban Pekat (penyakit masyarakat).	Laporan hasil Bidang Trantibum Satpol pp, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata
		3. Operasi penertiban IMB (Izin Mendirikan Bangunan).	Laporan hasil Bidang Trantibum Satpol PP dan Dinas Tarukim
		4. Kegiatan pengamanan / pengawalan hari - hari besar dan acara - acara tertentu.	Laporan hasil Seksi Pamwal Satpol PP
		5. Pengendalian demonstrasi massa.	Laporan hasil Seksi Ops dan Penertiban Satpol PP dan Polri
		6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	Laporan hasil Bidang Trantibum Satpol PP
		7. Operasi penertiban papan reklame/bcllho.	Laporan hasil Bidang Trantibum satpol PP dan Dispenda
		8. Monitoring Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	Laporan hasil Bidang LINMAS
2.	Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai.	1. Kegiatan Bimtek.	Laporan hasil Subbag Umum dan Kepegawaian
		1. Sosialisasi peraturan perundang - undangan	-
		3. Pelatihan pengendalian keamanan.	Laporan hasil Bidang Trantibum & Polri
		4. Penyusunan Renstra.	Laporan hasil Subbag Program dan Keuangan
		5. Pelatihan Bagi LINMAS Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	Laporan hasil Bidang LINMAS

Binjai,
KEPALA SATPOL PP - PP
KOTA BINJAI

2019

SUGIONO, SE
PEMBINA
NIP. 19671110 198903 1 007

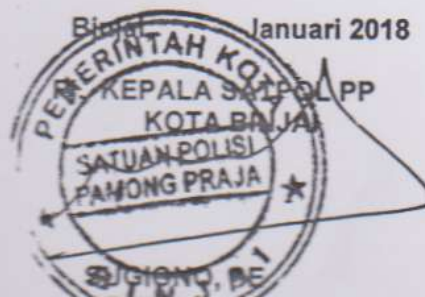
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATPOL PP KOTA BINJAI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Penyelenggaraan pelayanan (ketenteraman, ketertiban umum dan penegakan Perda/Perwa) yang sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.	Terlaksananya Operasi Razia Penertiban dan Penegakan Perda/Perwa :	
		1. Operasi penertiban PKL.	90 kasus
		2. Operasi penertiban Pekat.	85 kasus
		3. Operasi penertiban IMB.	320 kasus
		4. Pengamanan/ pengawalan pejabat daerah, & hari besar.	96 kegiatan
		5. Pengendalian demonstrasi massa.	16 kegiatan
		6. Bantuan tenaga pendamping TNI/Polri.	4 orang
		7. Operasi penertiban papan reklame/baliho.	4 kegiatan
2.	Kinerja sumber daya aparatur yang handal, profesional dan akuntabel pada Satpol PP Kota Binjai.	8. Monitoring Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	8 instansi
		Pemahaman aparatur terhadap Tupoksi SKPD :	
		1. Kegiatan bimtek.	12 kegiatan
		2. Sosialisasi peraturan perundang - undangan	1 kegiatan
		3. Pelatihan pengendalian keamanan.	2 kegiatan
		4. Penyusunan Renstra.	1 laporan
		5. Pelatihan Bagi LINMAS Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	2 kegiatan

No.	Program	Anggaran	Keterangan	
1.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 117.187.500	Program Sasaran Strategis Tidak Utama	
2.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Rp. 7.500.000		
3.	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.	Rp. 1.920.724.000	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.110.514.500
4.	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 95.000.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 124.650.000
5.	Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 30.000.000		
6.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan Daerah.	Rp. 48.000.000	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 188.230.000
	JUMLAH	Rp. 2.218.411.500	JUMLAH	Rp. 1.423.394.500

WALIKOTA BINJAI

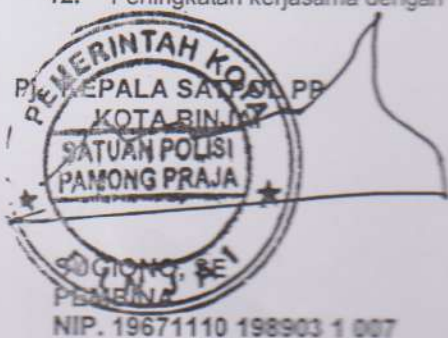
M. IDAHAM, SH, M. SI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIS SATPOL PP KOTA BINJAI

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat Kota Binjai	Input : Dana Output : Bantuan kegiatan operasi penertiban dan pengamanan: pkl, imb, dan penyakit masyarakat serta pengamanan/ pengawalan pejabat daerah, hari – hari besar dan tertentu dari teanga pedamping TNI / POLRI untuk periode 1 tahun Outcome : Terlaksananya bantuan kegiatan operasi penertiban dan pengamanan pkl, imb, dan penyakit masyarakat serta pengamanan/ pengawalan pejabat daerah, hari – hari besar dan tertentu dari teanga pedamping TNI / POLRI untuk periode 1 tahun	Input : 100% Output : 4 orang personil tenaga pendamping TNI kegiatan operasi penertiban dan pengamanan PERDA Outcome : Selesainya 90 kasus PKL, 85 kasus penyakit masyarakat, 320 kasus IMB, dan 96 kegiatan pengamanan/ pengawalan
2.	Meningkatkan sumber daya aparatur Satpol PP kota binjai menjadi terampil dan lebih baik	Input : Dana Output : Kegiatan Bimtek untuk periode 1 tahun Outcome : terlaksananya kegiatan Bimtek untuk periode 1 tahun	Input : 100% Output : 10 personil Bimtek Keuangan/Kepegawaian Outcome : Meningkatnya pengetahuan keterampilan 10 personil Bimtek Keuangan/Kepegawaian
3.	Meningkatkan disiplin aparatur satpol PP Kota Binjai menjadi lebih baik	Input : Dana Output : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk periode 1 tahun Outcome : Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk periode 1 tahun	Input : 100% Output : 165 pakaian dinas aparatur Satpol PP Outcome : Meningkatnya kepatuhan berseragam 76 orang aparatur Satpol PP
4.	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan masyarakat Kota Binjai	Input : Dana Output : Kegiatan monitoring penjagaan rumah Dinas dan Kantor Outcome : Terlaksananya Kegiatan monitoring penjagaan rumah Dinas dan Kantor	Input : 100% Output : 8 instansi penjagaan rumah Dinas dan Kantor Outcome : Selesainya 90 kasus PKL, 85 kasus penyakit masyarakat, 320 kasus IMB, dan 96 kegiatan pengamanan/ pengawalan
5.	Meningkatkan sumber daya aparatur Satpol PP kota binjai menjadi terampil dan lebih baik	Input : Dana Output : Kegiatan pelatihan bagi LINMAS penjagaan rumah Dinas dan Kantor Outcome : Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi LINMAS penjagaan rumah Dinas dan Kantor	Input : 100% Output : 60 personil pelatihan penjagaan rumah Dinas dan Kantor Outcome : Meningkatnya keterampilan 60 personil pelatihan penjagaan rumah Dinas dan Kantor
6.	Meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Input : Dana Output : Kegiatan Razia Narkoba di 5 Kecamatan dan Tempat Kos – Kos an Outcome : Terlaksananya Kegiatan Razia Narkoba di 5 Kecamatan dan Tempat Kos – Kos an	Input : 100% Output : 2 Kegiatan Razia Narkoba di 5 Kecamatan dan Tempat Kos – Kos an Outcome : Berkurangnya tingkat pengguna Narkoba di 5 Kecamatan dan Tempat Kos – Kos an

No	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.110.514.500,-
2.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 124.650.000,-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp 188.230.000,-
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp 117.187.500,-
5.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 7.500.000,-
6.	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Rp 35.000.000,-
7.	Keamanan Dan Kenyamanan di Lingkungan Rumah Dinas Dan Kantor	Rp 720.000.000,-
8.	Pengendalian keamanan lingkungan	Rp 57.600.000,-
9.	Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp 576.000.000,-
10.	Pelatihan Bagi LINMAS Penjagaan Rumah Dinas dan Kantor	Rp 83.100.000,-
11.	Operasional Kegiatan LINMAS	Rp 39.500.000,-
12.	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Rp 60.000.000,-



Binjai, Januari 2018
SEKRETARIS
SATPOL PP KOTA BINJAI

MISBACH ARDIAN LUBIS, AP
PENATA TK.I
NIP. 19770405 199511 1 001